

ABSTRAKSI

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, objek pranata praperadilan sebagaimana pengertian praperadilan dalam pasal 10 huruf a KUHAP telah diperluas maknanya, sehingga proses penyidikan yang didalamnya juga termasuk juga penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan adalah bagian dari pranata praperadilan.

Oleh karena itu maka penulis tertarik menulis tesis ini dengan judul "Perbandingan Pelaksanaan Proses Praperadilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Di Pengadilan Negeri Batang".

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan yuridis sosiologis dan yuridis normatif, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi dan konten analisis.

Di akhir penelitian penulis simpulkan bahwa walaupun putusan MK memang bersifat final and binding serta mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi (merupakan putusan akhir). Namun demikian tidak berarti secara otomatis mengubah Hukum Acara Pidana. Karena perubahan itu hanya dapat dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Negara, yaitu Presiden dan DPR yang menjadi keputusan negara. Objek praperadilan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, terdiri dari: sah tidaknya tindakan upaya paksa (berupa: penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan); sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti rugi atau rehabilitasi Objek praperadilan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yaitu terjadinya penambahan objek praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Selain itu, implikasi putusan MK a quo juga berpengaruh terhadap keabsahan penangkapan dan keabsahan penahanan harus berdasarkan syarat objektif penyidik; melalui dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka agar memenuhi dugaan "bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup".

Kata kunci : Praperadilan, Putusan MK, Objek Praperadilan

ABSTRACTION

Based on the decision of the Constitutional Court Number: 21 / PUU-XII / 2014, the object of pretrial institutions as defined in pretrial in article 10 letter a of the Criminal Procedure Code has been expanded in meaning, so that the investigation process which also includes the determination of suspects, searches, confiscations is part of pretrial institutions.

Therefore, the writer is interested in writing this thesis with the title "Comparison of the Implementation of Pre-trial Process Before and After the Decision of the Constitutional Court Number: 21 / PUU-XII / 2014 in the Batang District Court".

In this study the authors used a type of descriptive research with sociological juridical and normative juridical, data collection methods with literature study, observation and content analysis.

At the end of the study the authors concluded that although the Constitutional Court's decision was indeed final and binding and binding and legal remedies could not be made anymore (a final decision). However, that does not mean automatically changing the Criminal Procedure Code. Because the change can only be done by an official institution appointed by the State, namely the President and the Parliament which is the state's decision. Pre-trial objects prior to the enactment of the Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014, consisting of: whether or not a forced act of force (in the form of: arrest, detention, search and seizure); the validity of the termination of the investigation or the termination of the prosecution; and compensation or rehabilitation of pretrial objects after the enactment of the Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014, namely the addition of pretrial objects for the validity of determining the suspect. In addition, the implications of the a quo Constitutional Court ruling also affect the validity of arrest and the validity of detention must be based on the objective requirements of the investigator; through two pieces of evidence and an examination of a prospective suspect in order to fulfill the allegation of "preliminary evidence, sufficient preliminary evidence, and sufficient evidence".

Keywords: Pretrial, Decision of the Constitutional Court, Object of Pretrial